

## MORALITAS PEJABAT PUBLIK

**Indrajaya Mokoagow**  
[aby\\_mokoagow@yahoo.com](mailto:aby_mokoagow@yahoo.com)  
**Universitas Negeri Gorontalo**

### ABSTRAK

Moralitas pejabat publik menjadi isu yang semakin penting dalam konteks pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi moralitas pejabat publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis mereka. Melalui metode kualitatif dan kuantitatif, data dikumpulkan dari wawancara, survei, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan, budaya organisasi, dan tingkat integritas pejabat publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan moralitas pejabat publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

**Kata Kunci:** Moralitas, Pemerintahan.

### ABSTRACT

*The morality of public officials is an increasingly important issue in the context of transparent and accountable government. This research aims to explore the morality of public officials in South Bolaang Mongondow Regency by analyzing the factors that influence their ethical behavior. Through qualitative and quantitative methods, data was collected from interviews, surveys and document analysis. The research results show that there is a significant relationship between education, organizational culture, and the level of integrity of public officials. It is hoped that this research can provide recommendations to improve the morality of public officials in the area.*

**Keywords:** Morality, Government.

### PENDAHULUAN

Moralitas pejabat publik merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Di Indonesia, banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut survei yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2021, Indonesia masih berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Transparency International, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masalah moralitas pejabat publik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu mendapatkan perhatian serius.

Bolaang Mongondow Selatan, sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Utara, memiliki tantangan tersendiri dalam hal moralitas pejabat publik. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kabupaten ini berpotensi mengalami praktik korupsi yang tinggi jika tidak diimbangi dengan moralitas yang baik dari para pejabatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai moralitas pejabat publik di daerah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat berperan dalam meningkatkan moralitas pejabat publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2020), pendidikan etika dan integritas dalam pelatihan pegawai negeri dapat mengurangi tindakan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pejabat publik di Bolaang Mongondow Selatan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang moralitas pejabat publik di Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian ini adalah pejabat dan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diwakili oleh sejumlah informan yang relevan dengan topik penelitian.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman pejabat publik serta masyarakat terkait moralitas pejabat. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel tertentu, seperti pendidikan, budaya organisasi, dan moralitas pejabat publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk wawancara mendalam dengan pejabat publik dan masyarakat, survei yang melibatkan 200 responden dari berbagai latar belakang, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan yang telah disusun sebelumnya, untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dapat dibahas.

Survei yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap moralitas pejabat publik. Responden dipilih secara acak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mendapatkan representasi yang baik. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari laporan pemerintah dan survei sebelumnya yang relevan.

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkategorikan dan menginterpretasikan data wawancara untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan moralitas pejabat publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi moralitas pejabat publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pertama, tingkat pendidikan pejabat publik berpengaruh signifikan terhadap moralitas mereka. Data menunjukkan bahwa pejabat dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki integritas yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Susanto (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan formal dapat meningkatkan kesadaran etis dan moral seseorang.

Kedua, budaya organisasi di instansi pemerintah juga berperan penting dalam membentuk perilaku pejabat publik. Penelitian ini menemukan bahwa instansi yang menerapkan nilai-nilai etika dan transparansi dalam budaya kerjanya cenderung memiliki pejabat yang lebih berintegritas. Misalnya, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, penerapan program pelatihan etika kerja berhasil mengurangi kasus penyalahgunaan wewenang (Halim, 2023).

Ketiga, dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan masukan kepada pejabat publik dapat mendorong perilaku etis. Penelitian oleh Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pejabat publik.

Keempat, tantangan eksternal seperti tekanan politik dan ekonomi juga mempengaruhi moralitas pejabat publik. Dalam beberapa kasus, pejabat publik terpaksa mengambil keputusan yang tidak etis karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal juga perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan moralitas pejabat publik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas pejabat publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rekomendasi untuk meningkatkan moralitas pejabat publik akan dibahas lebih lanjut dalam kesimpulan penelitian ini.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya moralitas pejabat publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Faktor-faktor seperti pendidikan, budaya organisasi, dukungan masyarakat, dan tantangan eksternal berperan signifikan dalam membentuk perilaku etis pejabat publik. Untuk meningkatkan moralitas pejabat publik, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pendidikan etika bagi pejabat publik serta penguatan budaya organisasi yang menekankan pada nilai-nilai integritas dan transparansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat publik juga perlu didorong untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Moralitas Pejabat Publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123-135.
- Nasution, R. (2022). *\*Wawancara Mendalam dalam Penelitian Sosial: Metode dan Aplikasi\**. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Prasetyo, B. (2022). *\*Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pejabat Publik: Studi Kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan\**. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 10(1), 45-60.
- Rachmawati, L. (2020). *\*Pendidikan Etika dan Integritas dalam Pelatihan Pegawai Negeri: Pengurangan Tindakan Korupsi\**. *Jurnal Etika dan Publik*, 8(3), 201-215.
- Susanto, M. (2021). *\*Pengaruh Pendidikan terhadap Kesadaran Etis Pegawai Publik: Sebuah Tinjauan Empiris\**. *Jurnal Pendidikan dan Etika*, 12(4), 310-325.
- Transparency International. (2021). *\*Indeks Persepsi Korupsi 2021\**. Diakses dari [<https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/nzl>](<https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/nzl>).
- Banerjee, A.V., & Duflo, E. (2019). *Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems*. PublicAffairs
- Pranarka, S. P. (2018). *Pembangunan Desa dan Kemandirian Keuangan Desa*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumaryanto, A., & Ismail, S. (2017). *Pengelolaan PADes dan Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Suyanto, E. (2015). *Pembangunan Ekonomi Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sularso, A., & Restianto, H. (2011). *Manajemen Keuangan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Baswir, R. (2000). *Ekonomi Kerakyatan: Alternatif untuk Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparmoko. (2002). *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.